

PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) DI DAS KONTA MALANG: PEMBELAJARAN KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM

Noviana Khususiyah

World Agroforestry Centre (ICRAF)

E-mail: n.khususiyah@cgiar.org

ABSTRACT

The pressures of population, economics and politics have contributed to natural resources' exploitation and land degradation including forestry. Generally, forest management in Java is carried out by the Forestry State Enterprise (Perum Perhutani). Joint Community Forest Management (PHBM) is a program initiated by the Ministry of Forestry that involves the community in managing forests. The program was intended to reduce forest destruction and conflicts with communities, particularly in Java. One of the programs was implemented in Konto Watersheds, Malang, East Java that are covered two sub-districts, Ngantang and Pujon. However, PHBM program in Konto watershed was considered unsuccessful due to illegal logging, encroachment and forest fires. The objectives of this research are: (1) to analyze factors influence the successfulness of PHBM program, (2) to analyze factors influence community knowledge of PHBM Program. Field observations, interviews with households and a literature study were conducted to collect data. We used multiple linear regression analysis to reveal the factors influencing success and binary logistic regression analysis to reveal the factors influencing farmers' knowledge. The results of this research were that the factors influencing success were the husband and wife's perceptions, household income, manner of get land from Perhutani (buying or inheritance and share cropping) and age of respondent. Perceptions of PHBM were influenced by income, formal education, secondary jobs, extension services and the wife's knowledge of the program.

Keywords: community collaborative forest management (PHBM), community perceptions, Konto watershed

I. PENDAHULUAN

Daerah Aliran Sungai (DAS) Konto yang berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur mencakup dua kecamatan, yaitu Pujon dan Ngantang. Tutupan lahan di bagian hulu DAS Konto didominasi semak belukar, hutan alam dan hutan tanaman yang dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) Perhutani. Seperti pengelolaan hutan di Jawa pada umumnya, pengelolaan hutan di DAS Konto oleh Perum Perhutani ini menerapkan sistem sentralistik, sehingga ruang partisipasi daerah dan masyarakat sekitar hutan menjadi terbatas.

Peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan ekonomi dan perubahan situasi politik di Indonesia menyebabkan tekanan terhadap lahan, terutama hutan. Eksploitasi hutan secara tidak bijaksana berujung pada degradasi hutan, bahkan konflik sosial yang mengakibatkan kerusakan hutan. Kejadian seperti ini tidak hanya di luar Jawa, tetapi juga di Pulau Jawa termasuk di kawasan DAS Konto. Dalam rangka mengurangi konflik sosial dalam hal pemanfaatan lahan, Perum Perhutani melakukan berbagai kegiatan pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat (Perum Perhutani, 1992). Salah satu kegiatannya adalah Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dasar hukum dari program ini adalah Keputusan Direksi Perhutani Nomor 1061/Kpts/Dir/2000 yang kemudian diganti dengan Keputusan Dewan Pengawas Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001.

Program PHBM ini merupakan pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan prinsip saling berbagi (*sharing*), kesetaraan dan keterbukaan. Prinsip berbagi yang dimaksud dalam program ini adalah adanya pembagian peran, tanggung jawab dan faktor produksi (*input*), bahkan hingga pembagian hasil (*output*). Program PHBM di Kuningan, Jawa Barat dan DAS Konto, Malang, Jawa Timur mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi kontribusinya masih sangat kecil (Pujo, 2003; Khususiyah, 2008). Selain kontribusi terhadap pendapatan masyarakat masih rendah, keberhasilan program PHBM di DAS Konto belum sesuai dengan standar yang diharapkan Perhutani.

Hal ini terlihat dari adanya pencurian kayu, perambahan dan kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan di hulu DAS Konto. Kondisi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Perhutani untuk meningkatkan efektifitas program agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki hutan di sekitar tempat tinggalnya dan dapat memberikan manfaat berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program PHBM, (2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat terhadap program PHBM.

II. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan, wawancara dengan panduan kuesioner dan studi pustaka. Penentuan kecamatan dan desa sampel dilakukan secara sengaja, berdasarkan hasil observasi. Desa yang diambil sebagai sampel adalah dua desa di Kecamatan Pujon, yaitu Desa Tawangsari dan Pandesari; dan dua desa di Kecamatan Ngantang, yaitu Desa Ngantru dan Sidodadi. Pengambilan sampel rumah tangga dilakukan secara acak (*random sampling*) dengan menggunakan panduan kuesioner. Responden penelitian ini sebanyak 120 rumah tangga di Kecamatan Ngantang dan Pujon.

Metode analisis data yang digunakan adalah: **(1) Analisis Regresi Linier Berganda** untuk menganalisis variabel-variabel sosial ekonomi yang mempengaruhi tingkat keberhasilan program PHBM. Data persentase keberhasilan hidup dari pohon yang ditanam dalam program PHBM merupakan variabel terikat/*dependent variable* (Y); umur responden, pendapatan keluarga, pendidikan responden, jumlah anggota keluarga, luas total lahan yang dimiliki, waktu tempuh dari rumah ke lahan, cara memiliki lahan (dengan membeli, warisan dan bagi hasil), kemiringan lahan, pekerjaan sampingan responden, persepsi responden tentang PHBM (suami mengetahui PHBM tetapi istri tidak dan suami dan istri sama-sama mengetahui PHBM) sebagai variabel bebas/*independent variable* (X); dan **(2) Analisis Regresi Logistik Biner** untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat tentang program PHBM. Pada analisis ini dilakukan dengan melihat nilai *odds ratio*, yaitu perbandingan antara besarnya peluang tingkat responden yang mengerti program PHBM ($P=1$) atau peluang besarnya responden yang tidak mengetahui program PHBM ($P=0$) (Gujaraty D, 2003). Data tingkat pengetahuan responden terhadap program PHBM merupakan variabel terikat/*dependent variable* (Y) dan umur responden, pendapatan keluarga, pendidikan responden, pekerjaan sampingan, responden pernah mengikuti penyuluhan dan persepsi (istri mengetahui program PHBM) sebagai variabel bebas/*independent variable* (X).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan Program PHBM

Persentase keberhasilan hidup pohon yang ditanam dalam program PHBM digunakan sebagai indikator keberhasilan program, karena semakin tinggi persen keberhasilan hidupnya berarti kepedulian terhadap pohon yang ditanam semakin tinggi. Di Kecamatan Ngantang persen keberhasilan hidup pohon lebih tinggi, yaitu mencapai 90% bila dibandingkan dengan di Pujon, yaitu 52% (Tabel 1).

Tabel 1. Rata-rata persen keberhasilan hidup pohon yang ditanam dalam program PHBM dan rata-rata luas lahan kelola

Desa/Kecamatan	Rata-rata persen keberhasilan hidup pohon (%)	Rata-rata luas lahan Perhutani yang dikelola (hektar)
Kecamatan Ngantang	89,76	0,26
Ngantru	90,70	0,23

Desa/Kecamatan	Rata-rata persen keberhasilan hidup pohon (%)	Rata-rata luas lahan Perhutani yang dikelola (hektar)
Sidodadi	88,82	0,29
Kecamatan Pujon	51,85	0,68
Tawangsari	44,28	0,43
Pandesari	59,42	0,92

Sumber: data primer diolah (2008)

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel bebas yang berpengaruh terhadap keberhasilan program PHBM di DAS Konto pada taraf nyata $\alpha = 1\%$ adalah persepsi (suami mengetahui program PHBM, tetapi istri tidak) dan suami dan istri sama-sama mengetahui program PHBM. Sementara, variabel yang berpengaruh pada taraf nyata $\alpha = 5\%$ adalah pendapatan rumah tangga, cara memiliki/menguasai lahan Perhutani (dengan membeli, warisan dan bagi hasil), serta variabel yang berpengaruh pada taraf nyata $\alpha = 10\%$, adalah umur responden (Tabel 2).

Selain faktor-faktor tersebut di atas, tingkat kepercayaan masyarakat, adanya aturan kelompok dan intensitas penyuluhan juga berpengaruh terhadap keberhasilan program PHBM.

Tabel 2. Nilai koefisien hasil analisis regresi dari variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan program PHBM dan nilai *t* hitungnya

Variabel	Ordinary least squares (OLS)	
	koefisien	t
Konstanta	85,62***	7,99
Cara mendapatkan lahan: membeli hak kelola	-7,91**	-2,00
Cara mendapatkan lahan : warisan, bagi hasil	-11,46**	-2,17
Persepsi (suami mengetahui PHBM, tetapi istri tidak)	17,91***	4,44
Persepsi (suami dan istri mengetahui PHBM)	15,44***	2,98
Variabel lainnya (tidak dilaporkan)		

Keterangan: *** berbeda nyata pada level $\alpha = 1\%$; ** berbeda nyata pada level $\alpha = 5\%$

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program PHBM di DAS Konto dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Cara mendapatkan lahan kelola

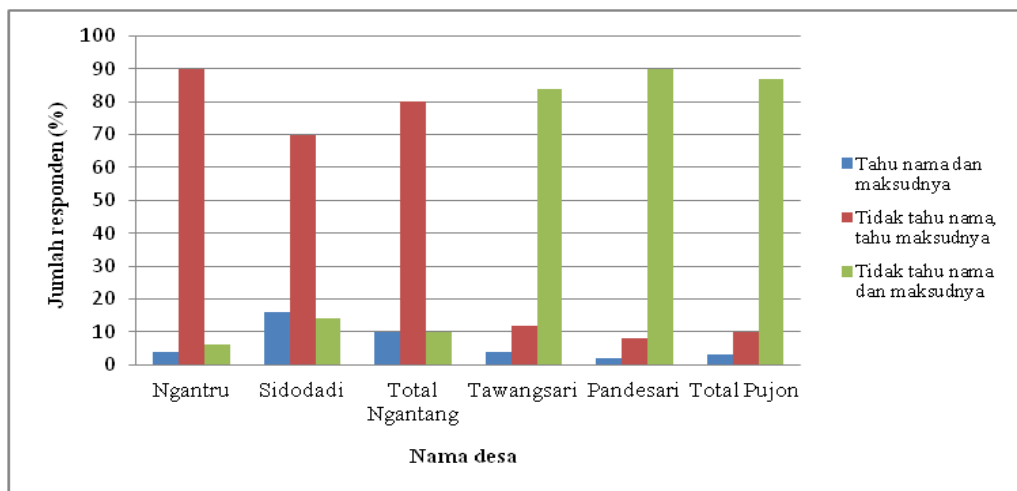
Pada awal program, banyak masyarakat miskin di Kecamatan Ngantang dan Pujon yang menjadi peserta PHBM sehingga mendapatkan hak kelola lahan dari Perhutani. Namun, kemudian banyak terjadi kasus pengalihan hak kelola lahan Perhutani yang dikenal dengan istilah "*uang ganti rugi*" oleh peserta PHBM yang miskin kepada orang yang lebih mampu, terutama di wilayah Kecamatan Pujon. Menurut aturan PHBM, lahan yang diberikan tidak boleh dipindahtangankan. Karena lahan garapan telah dipindahtangankan, maka sekarang mereka tidak memiliki lahan lagi, sehingga dampak dari program PHBM ini tidak dapat dirasakan, terutama terhadap pendapatan mereka. Sementara itu, masyarakat yang membeli hak kelola lahan Perhutani dari peserta PHBM, umumnya kurang memahami aturan-aturan dalam program PHBM, seperti menanam dan menyulam bibit pohon. Mereka lebih mementingkan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari lahan Perhutani, sehingga mereka memilih menanam sayuran seperti: wortel, kentang, seledri, kubis, dan lainnya.

Penelitian yang terkait dengan status hak guna lahan terhadap keberhasilan PHBM membuktikan bahwa masyarakat yang memiliki lahan dengan membeli hak kelola, memperoleh warisan dan bagi hasil kurang mendukung terhadap keberhasilan PHBM. Hal ini juga dapat dilihat dari persentase pohon yang berhasil hidup di Kecamatan Pujon hanya mencapai 52%.

2. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat

Pada sistem PHBM di Kabupaten Malang, sebelum kontrak kerja sama antara Perhutani dan masyarakat pengelola hutan diberikan, terlebih dahulu dibentuk suatu lembaga yang dinamakan LKDPH (Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan) atau di daerah lain disebut LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Anggota LKDPH adalah masyarakat peserta program PHBM dan para

pengurusnya. LKDPH merupakan lembaga pengelola lahan Perhutani di desa hutan yang tugasnya bekerjasama atau menjalin kemitraan dengan Perhutani dalam rangka pelestarian alam dan pembangunan hutan.



Gambar 1. Persentase pengetahuan responden terhadap Program PHBM

Hasil penelitian yang dilakukan di kedua kecamatan tersebut, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program PHBM dan lingkungan berpengaruh terhadap keberhasilan program. Di Kecamatan Ngantang mayoritas masyarakat (80%) mengetahui adanya program tersebut dan mengerti maksudnya, meskipun tidak tahu namanya. Sedangkan di Kecamatan Pujon, hampir semua responden (87%) tidak tahu nama dan tidak mengerti maksud dari Program PHBM (Gambar 1).

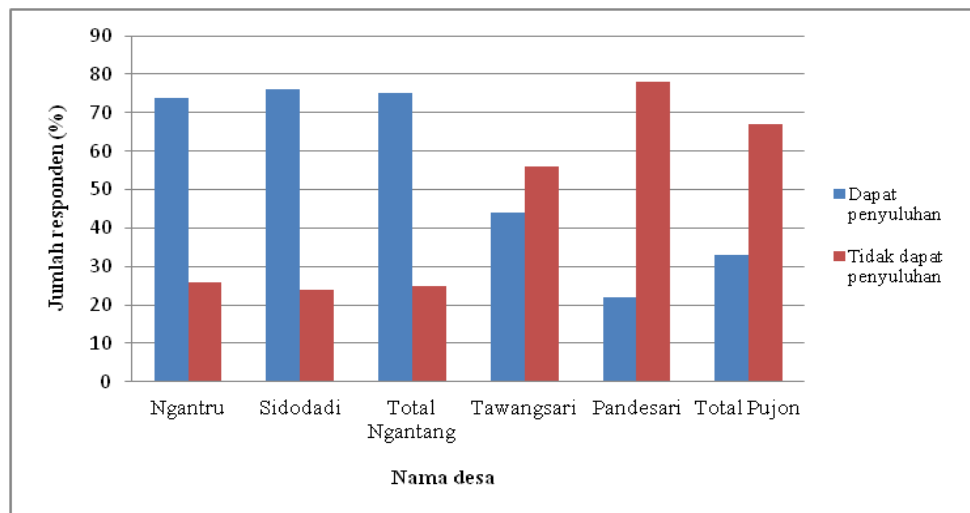
Tidak hanya pengetahuan suami sebagai anggota kelompok LKDPH saja yang mempengaruhi keberhasilan program PHBM, tetapi pengetahuan istri tentang program PHBM juga memiliki sumbangan yang cukup berarti. Di Kecamatan Ngantang lebih banyak istri yang mengerti tentang program PHBM (33%) bila dibandingkan dengan di Kecamatan Pujon (18%). Tingkat pengetahuan yang baik mengenai program PHBM, menciptakan harapan bahwa program tersebut dapat membantu mengatasi persoalan kemiskinan masyarakat, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara berkesinambungan.

3. Tingkat kepercayaan masyarakat

Tingkat kepercayaan dan kedekatan antara peserta PHBM dengan petugas Perhutani menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program PHBM di Kabupaten Malang. Di Kecamatan Ngantang, terjalin interaksi yang baik antara Pengurus PHBM maupun petugas Perhutani dengan masyarakat peserta PHBM, sehingga tercipta rasa saling percaya diantara kedua belah pihak. Sedangkan di Kecamatan Pujon, interaksi antara petugas Perhutani dengan masyarakat peserta PHBM kurang harmonis, sehingga tidak ada rasa saling percaya diantara kedua belah pihak, akibatnya informasi mengenai program tersebut tidak sampai ke sasaran. Oleh karena itu, masing-masing pihak memiliki persepsi yang berbeda terhadap maksud dan tujuan dari program PHBM.

4. Penyuluhan

Penyuluhan dan pengembangan pada program PHBM pada awal kegiatan ditekankan pada proses sosialisasi program yang bertujuan untuk mengenalkan konsep, kebijakan, kelembagaan serta prosedur dari kegiatan PHBM kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan untuk menyamakan pengetahuan serta merangsang partisipasi masyarakat agar mau terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Perhutani. Dengan adanya kesamaan pengetahuan, diharapkan masyarakat dapat menjaga keberlanjutan kegiatan dalam program PHBM.



Gambar 2. Persentase responden yang pernah mendapat penyuluhan

Hasil penelitian di kedua kecamatan menunjukkan bahwa anggota PHBM di Kecamatan Ngantang yang pernah mengikuti penyuluhan lebih banyak dibandingkan dengan di Kecamatan Pujon (Gambar 2). Hal tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan program PHBM di Kecamatan Ngantang dibandingkan dengan Pujon. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi melalui penyuluhan terhadap masyarakat pengelola hutan tentang PHBM dan lingkungan sangat diperlukan. Sosialisasi sebaiknya langsung pada petani dan juga pada istri petani, karena istri dapat menjadi media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada suami.

5. Aturan-aturan dalam kelompok

Selain kontrak perjanjian kerjasama antara masyarakat peserta PHBM dengan Perhutani mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, kelompok peserta program PHBM juga memiliki aturan dalam kelompoknya yang dibuat untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Dengan adanya aturan kelompok ini, maka anggota kelompok akan mematuhi aturan, hal ini karena takut kena denda. Dengan demikian, aturan tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program PHBM. Sebagai contoh, isi aturan yang dibuat oleh Kelompok PHBM di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang menyebutkan bahwa: masyarakat yang merusak, mengganggu atau mencuri tanaman yang terdapat di lahan Lodenan/hutan dikenakan sanksi (denda), apabila sampai pada batas waktu pembayaran denda tidak dilakukan, maka penanganan urusan akan dilanjutkan ke pihak yang berwajib (kepolisian).

B. Faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Pengetahuan Responden tentang Program PHBM

Hasil analisis *regresi logistik biner* menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap pengetahuan tentang program PHBM adalah: (1) responden pernah mengikuti penyuluhan dan istri mengetahui program PHBM (pada taraf $\alpha = 1\%$ atau berpengaruh sangat nyata), (2) pendapatan rumah tangga dan rumah tangga tersebut memiliki pekerjaan sampingan (pada taraf nyata $\alpha = 5\%$ atau berpengaruh nyata), (3) tingkat pendidikan responden (pada taraf nyata $\alpha = 10\%$) (Tabel 3).

Tabel 3. Variabel yang mempengaruhi pengetahuan responden tentang program PHBM

Variabel	Ordinary least squares (OLS)				
	Koefisien	Odds Ratio	Simpangan baku	Z	P> z
Konstanta					
Umur	0,019	1,019	0,021	0,94	0,349
Pendapatan	-0,000	1,000	1,630	-2,37	0,018**
Pendidikan	0,229	1,257	0,166	1,73	0,083*
Pekerjaan sampingan	1,556	4,738	3,408	2,16	0,031**
Penyuluhan	1,723	5,604	3,120	3,10	0,002***

Persepsi istri mengetahui program PHBM	3,840	46,518	52,956	3,37	0,001***
--	-------	--------	--------	------	----------

Keterangan: *** berbeda nyata pada level $\alpha = 1\%$; ** berbeda nyata pada level $\alpha = 5\%$

* berbeda nyata pada level $\alpha = 10\%$

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program PHBM di DAS Konto, antara lain:

1. Alih hak guna lahan. Ketaatan pada peraturan untuk tidak mengalihkan hak guna lahan kepada orang lain akan memberikan manfaat bagi masyarakat miskin yang memperoleh hak kelola, karena mereka dapat mengusahakan lahan tersebut;
2. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap program PHBM akan berdampak positif pada keberhasilan program, karena dengan pengetahuan yang cukup memadai dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan;
3. Penyuluhan dan tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat peserta PHBM, sangat penting dalam mendukung berjalannya program PHBM secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Diperlukan adanya peningkatan sosialisasi melalui penyuluhan terhadap masyarakat pengelola hutan tentang program PHBM dan lingkungan. Sosialisasi yang dilakukan sebaiknya langsung pada petani dan juga pada istri petani.
2. Kebijakan program PHBM sebaiknya dilaksanakan secara sinergis antara masyarakat, Perhutani dan pemerintah daerah.
3. Pengalihan hak kelola lahan melalui ganti rugi (jual beli) lahan Perhutani yang dikelola masyarakat sebaiknya dibuatkan aturan yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Gujaraty D. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan Sumarno Zain. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Noviana Khususiyah. 2009. Analisis Dampak Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap pendapatan masyarakat dan lingkungan di DAS Konto Malang. Thesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. Tidak diterbitkan.
- Khususiyah N, Suyanto S. dan Buana RY. 2009. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM): Upaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Petani Miskin di Sekitar Hutan. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office.
- Perum Perhutani. 1992. Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perhutani (Selaku Pengurus Perusahaan) Nomor 136/Kpts/Dir/2001. tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Jakarta.
- Pujo. 2003. Partisipasi Masyarakat pada Program Kehutanan Sosial di Perum Perhutani Unit III Jawa Barat (Kasus di Desa Cileuya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan dan Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung). Thesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. Tidak diterbitkan.